



# Sorotan Proyek UPS Menguat

## Mengarah ke Pejabat Berinisial AU

**BOLA** liar proyek pengadaan perangkat penyedia daya listrik cadangan atau Uninterruptable Power Supply (UPS) sebesar Rp 330 miliar terus menggelinding. Sejumlah nama pejabat di jajaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta disebut-sebut terlibat dalam kasus itu. Salah satunya pejabat di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan berinisial (AU) ■

Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun saat dikonfirmasi mengatakan, sesuai instruksi Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), kasus UPS sudah dibawa ke jalur hukum, yakni dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga siapapun yang terlibat, baik itu dari jajaran pejabat pemprov maupun DPRD DKI akan berhadapan dengan hukum. "Ya kami sudah ke jalur hukum, yakni KPK untuk mengungkap dugaan korupsi ini. Saya ikut mendampingi gubernur ke KPK, Jumat lalu," ujar Lasro, kemarin (1/3).

Ia berjanji akan mengungkap semuanya pada Senin (3/3). Perihal yang ia ketahui selama menjabat sebagai kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2014. Bahkan dirinya tidak khawatir bila dikait-kaitkan dengan kasus tersebut. "Senin saja saya jelaskan semuanya. Ya enggak apa-apa (dituding terlibat). Yang penting saya sudah mengatakan akan menjelaskan semuanya pada Senin besok," tandas dia.

Lasro merupakan salah satu pejabat yang menemani Gubernur Ahok ke Gedung KPK, Jumat sore. Kedatangan Ahok ke kantor lembaga anti-korupsi itu bertujuan untuk melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di DKI Jakarta pada 2012-2015.

Berbeda halnya dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Wilayah II Sudin Pendidikan Jakarta Barat Eyo Sunarya yang mengaku tak tahumenahu ihwal pengadaan UPS. Sebab dirinya baru sebulan menjabat di posisi Kasi Saprasedik.

"Lebih baik langsung ditanyakan saja ke kasi yang lama, Pak Alex Usman. Sekarang beliau dirotasi ke Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan," ungkap dia.

Sayangnya, sejauh ini Alex Usman belum bisa dikonfirmasi. Ayah dari anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra bernama Rani itu tidak mengaktifkan telepon genggamnya. Sebelumnya dikabarkan, pengadaan perangkat penyedia daya listrik diduga anggaran siluman. "Sekolah tidak pernah mengusulkan pengadaan UPS. Tiba-tiba barang datang dan langsung dipasang," kata Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Jakarta Barat Cedarkuine.

Menurut Cedar, pihaknya tak pernah diajak berkoordinasi oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat Alex Usman terkait pengadaan UPS. Ia juga mengaku tak tahu alasan sekolahnya menjadi salah satu penerima UPS. "Saya cuma dikasih bantuan, jadi terima saja," kata dia.

Pengakuan serupa diberikan oleh Wakil Kepala SMA Negeri 78 Jakarta Barat Sumarna. Ia menuturkan saat itu bukan rahasia jika sekolah tak pernah dibolehkan tahu mendetail soal bantuan. "Ada bantuan pokoknya sekolah harus terima, tidak boleh banyak tanya," kata dia. Alasan lain, jika tidak diterima maka bantuan akan diserahkan ke sekolah lain.

Dua sekolah itu menerima masing-masing dua set UPS pada November 2014. Di SMA Negeri 78, sebagian sudah langsung terpasang dengan laboratorium komputer sebagai penambah daya. Di samping sebagai back-up pasokan listrik untuk perangkat kerja elektronik ketika listrik padam. "Tidak untuk penerangan," kata Sumarna.

Di SMA Negeri 16, UPS difungsikan sebagai penambah daya untuk perangkat elektronik di kelas seperti LCD dan komputer. "Selebihnya berfungsi sebagai genset untuk back-up perangkat kerja elektronik, tidak untuk penerangan," tukas Cedarkuine. (wok/asp)